

STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REKONTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DI KECAMATAN NA IX-X, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA

Yuli Iman Sari Munthe
NPP. 29.0180

*Asal Pendaftaran Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: yuliimansarimunthe@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Started from problems that occurred due to flash floods in Na IX-X District which resulted in damage to facilities and infrastructure. So that post-disaster reconstruction is carried out. **Purpose:** to describe and analyze the inhibiting factors faced and the strategy of the Regional Disaster Management Agency of North Labuhanbatu Regency in dealing with the problems faced in the implementation of reconstruction. **Method:** This study used qualitative research methods. The data in this study were collected through interviews, documentation and observation. SWOT analysis technique is used to reduce, present and conclude. **Result:** The results obtained from this study in dealing with the problems of the implementation of reconstruction in Na IX-X District, North Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province based on a study on the strategy of the Regional Disaster Management Agency of North Labuhanbatu Regency in dealing with reconstruction problems have internal factors and external factors. In handling the problems faced by the implementation of reconstruction after the flash flood disaster, it is considered quite good even though there are obstacles in the form of a lack of budget, coordination between stakeholders who lack coordination, the many demands of the community and the culture of the people who reject the implementation of the reconstruction. **Conclusion:** The Regional Disaster Management Agency for North Labuhanbatu Regency in dealing with the problems of the implementation of reconstruction has various strategies such as making policies and programs that are more specific and involving stakeholders in supporting policies and programs for implementing post-disaster reconstruction, increasing the active role of all parties and utilizing social media as a means of aid information social.

Keywords: Strategy, Regional Disaster Management Agency, Reconstruction

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berawal dari masalah yang terjadi akibat bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana. Sehingga dilakukan rekontruksi pasca bencana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang faktor penghambat yang dihadapi serta strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekontruksi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan

observasi. Teknik analisis SWOT digunakan untuk mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan studi pada strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menangani permasalahan rekontruksi memiliki faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penanganan masalah yang dihadapi pelaksanaan rekontruksi pasca bencana banjir bandang dinilai sudah cukup baik meskipun ada hambatan berupa kurangnya anggaran, koordinasi antara stakeholder yang kurang berkoordinasi, banyaknya tuntutan masyarakat serta budaya masyarakat yang menolak pelaksanaan rekontruksi. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi memiliki berbagai strategi seperti membuat kebijakan dan program yang lebih spesifik serta melibatkan stakeholder dalam mendukung kebijakan dan program pelaksanaan rekontruksi pasca bencana, meningkatkan peran aktif dari segala pihak serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi bantuan sosial.

Kata kunci: Strategi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rekontruksi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun ulah manusia, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan bahkan memberikan dampak psikologis kepada masyarakat yang mengalami bencana¹. Pada dasarnya bencana sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia, dimana bencana itu dapat menyebabkan gangguan terhadap pola hidup manusia dan merugikan banyak pihak. Pelaksanaan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana². Pada tahap pasca bencana dilakukan pada setelah bencana sudah selesai dan berupaya untuk mengembalikan kondisi seperti keadaan semula sebelum saat terjadinya bencana. Pasca bencana dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan rekontruksi. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh bencana, mengembalikan fungsi kelembagaan dan dapat mengembalikan aktivitas atau kegiatan masyarakat seperti semula pada saat sebelum terjadinya bencana.

Pada rekontruksi dilakukan membangun kembali semua sarana dan prasarana secara permanen, memfungsikan kembali kelembagaan di tingkat masyarakat maupun pemerintahan, dengan sasaran utamanya untuk mengembalikan kegiatan sosial, budaya, perekonomian, menegakkan hukum dan ketertiban serta membangkitkan peran dan partisipasi masyarakat untuk menjalankan segala aspek kehidupan bermasyarakat di daerah bencana.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Aek Kuo, Aek Natas, Kualuh Hilir, Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Leidong, Na IX-X dan Marbau, dan memiliki 8 kelurahan serta 82 desa dengan luas wilayah 3.545,80 km², memiliki jumlah penduduk sekitar 381.944 jiwa dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/km². Ibu kota dari Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di Aek Kanopan. Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah timur

¹ Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 1

² Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 33

juga berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka dan sebelah barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir³. Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan juga termasuk daerah aliran sungai (DAS) sungai Kualuh dan DAS sungai Bilah yang dimana DAS merupakan suatu area atau kawasan yang dibatasi oleh titik-titik yang terletak pada dataran tinggi yang berfungsi untuk menampung air hujan ke sungai dan kemudian menyimpan dan mengalirkannya ke lautan. Karena keadaan Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki curah hujan yang tinggi dan merupakan daerah aliran sungai (DAS) sehingga menyebabkan Kabupaten Labuhanbatu Utara rawan bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah penanggung jawab dari pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertanggung jawab atas pemulihan kembali kondisi wilayah bencana dari dampak bencana⁴. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan yang melaksanakan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tugas untuk memberikan pedoman dan mengarahkan dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tersebut, yang dimana BPBD akan merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan dari kegiatan rekonstruksi tersebut. Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara akan membuat perencanaan rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari pelaksanaan kegiatan rekonstruksi tersebut dengan berdasar pada analisis dari kerugian dan kerusakan yang diakibatkan dari bencana banjir bandang. Kemudian melakukan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi tersebut.

Bencana alam banjir bandang pernah melanda Kecamatan Na IX-X pada 29 Desember 2019. Banjir bandang tersebut memporandakan dua desa yang ada di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Desa Hatapang dan Desa Pematang. Banjir bandang tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan terus menerus sehingga memicu meluapnya Sungai Lubuk Natiko dan Sungai Siria-ria dengan membawa material batu dan kayu dari perbukitan yang ada di hulu. Bencana banjir bandang di kecamatan Na IX-X sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah.

Kejadian bencana banjir bandang ini menyebabkan 5 korban jiwa, 9 unit rumah hanyut dan 45 unit rumah rusak berat, merusak lahan pertanian dan perkebunan, merusak jaringan Telkom serta merusak jembatan yang digunakan untuk penghubung antar desa.

Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan mengalami kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana dalam kendala tersebut berupa banyaknya prosedur dan lamanya proses dari rekonstruksi yang harus dilakukan dalam pengkajian kerusakan dari bencana tersebut, kemudian melakukan perencanaan, setelah itu dilaksanakannya aksi dari rekonstruksi tersebut. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan strategi yang tepat untuk mewujudkan rekonstruksi pasca bencana yang optimal sehingga dapat mengembalikan kegiatan atau aktivitas masyarakat seperti semula.

³ <https://www.labura.go.id/page/profil>

⁴ Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 5-6

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan 5 (lima) hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian Dwi Anita Sari (2017) dari Universitas Muhammadiyah Malang⁵ yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Sampang (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang)” menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi sudah sesuai dengan petunjuk Perka BNPB No.17 tahun 2010, akan tetapi dalam pelaksanaan programnya belum berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi antar pemerintah kabupaten dan anggaran yang belum tercukupi. Penelitian Ardhian Nehru (2017) dari Universitas Muhammadiyah Malang⁶ yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandasari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” menghasilkan bahwa peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekontruksi memiliki peran yang kecil, BPBD hanya sebagai fungsi koordinator dan pelaksana dari kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD terkait, sehingga berdampak kepada peran dari BPBD dalam menjalankan pengkajian kebutuhan pasca bencana karena tidak adanya legalitas yang jelas. Penelitian Willy Hardi Pratama (2018) dari Universitas Andalas⁷ yang berjudul “Permasalahan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009 di Sumatera Barat” menghasilkan bahwa permasalahan yang ada, yaitu fasilitator tidak bekerja secara maksimal, tidak adanya evaluasi hasil dari pelaksanaan rekontruksi, masyarakat yang dinilai kurang patuh, sumber daya finansial yang tidak cukup dan membutuhkan waktu yang lama. Penelitian Egi Solviandi (2018) dari Universitas Andalas⁸ yang berjudul “Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Permasalahan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Tsunami Tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai” menghasilkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap rekontruksi rumah pasca bencana tsunami tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada kondisi rata-rata (cukup puas). Penelitian Agung Mukti Wibowo (2018) dari STIEWW⁹ yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana” menghasilkan bahwa strategi yang dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kerja sama tim dengan pihak-pihak lain, memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya, meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, menambah jumlah Tim Reaksi Cepat.

⁵ Dwi Anita Sari, Skripsi: “Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Sampang (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang)” (Malang:UMM, 2017).

⁶ Ardhian Nehru, Skripsi: “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandasari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang” (Malang: UMM, 2017).

⁷ Willy Hardi Pratama, Skripsi: “Permasalahan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009 di Sumatera Barat” (Padang: UNAND, 2018).

⁸ Egi Solviandi, Skripsi: “Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Permasalahan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Tsunami Tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Mentawai” (Padang: UNAND, 2018).

⁹ Agung mukti Wibowo, Tesis: “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana” (Yogyakarta: STIEWW, 2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian dilakukan yakni strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, teori yang digunakan menggunakan teori strategi oleh Rangkuti (2014) yang menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, strategi yang dikemukakan oleh Rangkuti dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan rangkaian analisis terhadap adanya faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada organisasi/perusahaan yang kemudian juga memperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang mempengaruhi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi dan faktor penghambat yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan agar hasil penelitian dapat memberi gambaran secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan BPBD, Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi, Camat Na IX-X dan Masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun analisisnya menggunakan teori strategi yang digagas oleh Rangkuti (2014) yang menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, strategi yang dikemukakan oleh Rangkuti dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan rangkaian analisis terhadap adanya faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada organisasi/perusahaan yang kemudian juga memperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang mempengaruhi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X dengan menggunakan pendapat Rangkuti (2014) yang menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, strategi yang dikemukakan oleh Rangkuti dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan rangkaian analisis terhadap adanya faktor-faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada organisasi/perusahaan yang kemudian juga memperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang mempengaruhi.

3.1 Faktor Internal dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi

a. Faktor Kekuatan (Strengths) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi

1. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Dalam rangka memperoleh tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien maka daripada itu dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan suatu perencanaan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran penanganan masalah dalam pelaksanaan rekontruksi adalah: mengurangi resiko bencana dalam jangka panjang dan meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

2. Komitmen Badan Pelaksana dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Krisis kepercayaan terhadap kinerja para penyelenggara pemerintahan adalah karena kurang dikembangkannya aspek integritas, efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan tugasnya. Maka dari itu diperlukannya komitmen dari setiap badan pelaksana tersebut untuk fokus kepada penyelesaian setiap program-program yang ada sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemerintahan. Hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Abdi Yoso, M.Si mengatakan bahwa: komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat siap dan optimal dalam melaksanakan tugas dan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, dalam pelaksanaan rekontruksi sendiri kami dari tim BPBD sudah menyiapkan Tim Kaji Cepat, yang dimana Tim Kaji Cepat yang akan mendata semua kerusakan yang ada dengan berkoordinasi kepada SKPD yang terkait dalam hal pelaksanaan rekontruksi.

3. Sistem manajemen yang Baik dalam Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Pelaksanaan rekontruksi pasca bencana memerlukan suatu sistem manajemen yang baik sehingga dalam pelaksanaannya teratur dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Rekontruksi Mahlan, SE. Sistem manajemen dalam pelaksanaan rekontruksi sudah sangat kompleks dan jelas sekali, setelah kejadian bencana maka tim kaji cepat dibentuk sesuai komando dari kabupaten setelah itu berkoordinasi dengan dinas-dinas lainnya dalam pendataan kerusakan-kerusakan yang ada, setelah data-data sudah didapatkan, maka tim BPBD dan dinas-dinas lainnya melaksanakan rapat kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah daerah kabupaten, setelah sudah dapat persetujuan dari kabupaten, baru bisa dilaksanakannya rekontruksi pasca bencana tersebut.

b. Faktor Kelemahan (Weakness) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi

1. Anggaran dalam Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Dalam sebuah organisasi diperlukannya anggaran yang berfungsi sebagai faktor yang menentukan berjalannya suatu program atau tidak. Pengelolaan anggaran dari pelaksanaan rekontruksi yang tepat akan menghasilkan program yang baik dan akan berjalan dengan lancar. Berdasarkan informasi yang di dapat dari wawancara bersama Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Abdi Yoso, M.Si menjelaskan bahwa: peran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengelolaan alokasi anggaran dalam

pelaksanaan rekontruksi pasca bencana yaitu mengelola anggaran dengan berpedoman pada RPJMD yang telah disusun dan berdasarkan proposal pelaksanaan rekontruksi pasca bencana. Adapun pendapat dari Bapak Kepala Seksi Rekontruksi Mahlan, SE yaitu Anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana sangat kurang atau belum memadai, karena bencana merupakan suatu hal yang tidak terduga maka kurangnya dana yang diperkirakan tidak cukup yang telah disusun dalam RPJMD, sehingga pada saat terjadinya bencana banjir bandang tersebut untuk pelaksanaan rekontruksi diajukan proposal bantuan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memberikan dana dalam pelaksanaan rekontruksi, akan tetapi dana bantuan yang diberikan oleh pemda kabupaten juga tidak cukup karena kerugian yang diakibatkan dari banjir bandang tersebut sangatlah besar, sehingga masih ada sarana dan prasarana yang belum atau masih ditunda perbaikannya.

2. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Untuk Persamaan Persepsi dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Rangka mewujudkan penyamaan persepsi tujuan dan sasaran program yaitu terselenggaranya proses pelaksanaan rekontruksi yang saling bersinergi dan mendukung, maka mengoptimalkan koordinasi antar stakeholder terkait dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diwujudkan dengan pembuatan program kerja bersama secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala badan penanggulangan bencana daerah Drs. Abdi Yoso, M.Si mengatakan bahwa belum adanya koordinasi sepenuhnya dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Na IX-X Maka daripada itu perlu koordinasi dengan stakeholder lainnya yang lebih baik lagi.

3.2 Faktor Eksternal dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

c. Faktor Peluang (Opportunities) dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi

1. Dukungan Stakeholder dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Stakeholder yang ikut serta dalam pelaksanaan rekontruksi bencana adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Kaji Cepat, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kecamatan dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan rekontruksi dibutuhkannya dukungan dari stakeholder yang berkaitan agar pelaksanaan rekontruksi pasca bencana berjalan dengan optimal, cepat, efektif dan efisien. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Muhammad Nur Hasibuan, SE mengatakan bahwa: dalam pelaksanaan rekontruksi, BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertugas mengkoordinasikan kepada stakeholder yang berkaitan dari mulainya perencanaan hingga evaluasi dari hasil pelaksanaan rekontruksi. Dukungan dari stakeholder tersebut sangatlah mendukung pelaksanaan rekontruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X, seluruh stakeholder melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi kepada pihak BPBD dengan baik.

2. Komitmen Tinggi Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Visi dari Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara Hebat dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sejahtera dan Religious” sudah selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana yang sudah disusun sebegitu rupa dan dilahirkan berdasarkan hasil pemikiran strategis dari

segenap komponen organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara seiring dengan tuntutan dinamika perubahan aspirasi masyarakat yang berkembang dan tuntutan tugas dan fungsi organisasinya yang didasarkan atas aspek rasionalitas dan objektivitas. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Abdi Yoso, M.Si mengatakan bahwa komitmen yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah sangat optimal dan selalu berkoordinasi dan mendukung dalam hal pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X.

3. Media Sosial yang Membantu dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana

Media sosial sudah sangat tidak asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan rata-rata penduduk Indonesia memiliki akun media sosial sendiri. Banyak hal dapat dilakukan di media sosial terutama untuk komunikasi dan mendapat informasi di Indonesia maupun dunia. Begitu pula dengan organisasi pemerintahan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Rekonstruksi Mahlan, SE mengatakan bahwa: media sosial kita manfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X, sehingga masyarakat luas tahu dan mendapatkan perhatian lebih kepada korban bencana sehingga banyak masyarakat yang ingin menjadi relawan dan bahkan mengirimkan dan memberikan donasi dan bantuan kepada korban yang terdampak dari bencana banjir bandang tersebut.

d. Faktor Ancaman (Threats) Dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana

1. Budaya Masyarakat yang Menolak Dari Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana

Budaya masyarakat yang ada di kecamatan Na IX-X terutama di desa yang terkena dampak langsung dari akibat bencana banjir bandang adalah rata-rata dari penduduk tersebut memiliki mata pencaharian pertanian dan perkebunan serta membangun pemukiman di pinggir aliran sungai. Sehingga dalam pelaksanaan rekonstruksi banyak masyarakat yang menolak untuk berpindah dari tempat tinggal mereka, karena BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara merencanakan akan memindahkan pemukiman masyarakat desa tersebut ke tempat yang lebih aman dari bahaya bencana banjir. Menurut penduduk sekitar mereka tidak ingin berpindah tempat karena tempat tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka yang diturunkan secara turun-temurun tempat mereka dilahirkan. Pernyataan peneliti yang di atas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Abdi Yoso, M.Si pada hari Selasa tanggal 11 Januari pukul 14.35 WIB, mengatakan bahwa: pada pelaksanaan rekonstruksi yang dilaksanakan ada beberapa kendala, yaitu tentang budaya masyarakat Dari Desa Hatapang dan Desa Pematang. BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara merencanakan untuk memberikan lahan yang lebih aman dari tempat pemukiman masyarakat desa tersebut dan akan dibangun rumah, akan tetapi mereka menolak untuk pindah dari tempat pemukiman mereka yang berada di pinggir aliran sungai, karena pemukiman tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka dan juga mereka memiliki lahan pertanian dan perkebunan sehingga akses mereka dalam bertani dan berkebun lebih gampang karena berada di pinggir aliran sungai.

2. Banyaknya Tuntutan Masyarakat Terhadap BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengenai Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana

Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Na IX-X memberikan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa rumah yang rusak, lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat dari bencana banjir bandang. Sehingga dalam hal ini banyak masyarakat yang mengeluh dan menuntut pemerintahan daerah maupun BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera memperbaiki kerusakan yang mereka terima. Hal ini didukung oleh Bapak Kepala Seksi Rekontruksi Mahlan, SE yang mengatakan bahwa: banyak keluhan dan tuntutan dari masyarakat mengenai kerusakan lahan pertanian dan rumah-rumah mereka, banyak sekali keluhan-keluhan yang di dapat oleh BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahkan ada yang langsung datang kerumah saya sendiri hanya untuk menuntut untuk segera memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah maupun lahan pertanian mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. Abdi Yoso,M.Si mengatakan bahwa: tuntutan pasti ada dari masyarakat karena memang mereka yang paling merasakan dampak dari bencana banjir bandang tersebut, sehingga saya menghimbau dan mengkoordinasikan kepada kepala desa dan camat untuk segera menampung keluhan masyarakat dan dilaporkan kepada BPBD dan juga saya menghimbau untuk Tim Kaji Cepat agar benar-benar teliti untuk mendata kerusakan yang ada. Tetapi kitakan butuh waktu juga untuk mengerjakan proposal dan menunggu balasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara barulah dilaksanakannya rekontruksi. Namun pada waktu itu kita sudah memberikan lahan untuk membangun pemukiman yang baru tapi banyak masyarakat yang menolak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu warga Desa Hatapang Ibu Rosdinana, mengatakan bahwa pada saat terjadinya bencana banjir bandang rumah sama sawah saya rusak parah, saya mengharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kami. Tuntutan masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat mengharapkan agar datangnya bantuan segera dari pemerintahan untuk masyarakat yang terkena dari dampak bencana banjir bandang tersebut. Maka daripada itu tuntutan masyarakat, pemerintah harus segera memberikan bantuan dan meminimalisir tuntutan oleh pemerintah menjadi *zero complain*.

3.3 Matriks SWOT

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 2. Komitmen Badan Pelaksana dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 3. Sistem manajemen yang Baik dalam Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggaran dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk persamaan persepsi dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi pasca bencana

Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Stakeholder dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 2. Komitmen Tinggi Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 3. Media Sosial yang Membantu dalam Penanganan Masalah Pelaksanaan Rekontruksi Pasca Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan dan program yang lebih baik dan spesifik serta melibatkan stakeholder dalam mendukung kebijakan dan program dari pelaksanaan rekontruksi pasca bencana. 2. Meningkatkan peran aktif dari segala pihak, baik pemerintah daerah, BPBD maupun stakeholder lainnya dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana. 3. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi tentang terjadinya bencana dan bantuan sosial bagi yang terdampak terjadinya bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat antar stakeholder dalam pelaksanaan rekontruksi dengan mengutus perwakilan dari instansi masing-masing. 2. Memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi tentang open donasi bantuan bencana.
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya masyarakat yang menolak dari pelaksanaan rekontruksi pasca bencana 2. Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai pelaksanaan rekontruksi pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi tentang bahaya bencana oleh BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada masyarakat 2. Mengkaji kerusakan yang ada secara rinci oleh Tim Kaji Cepat dan stakeholder lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> I. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi tentang bencana kepada masyarakat II. Memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi tentang open donasi bantuan bencana. III. Melakukan rapat dengan stakeholder dalam setiap program kerja dan anggaran

Sumber: diolah peneliti, 2022

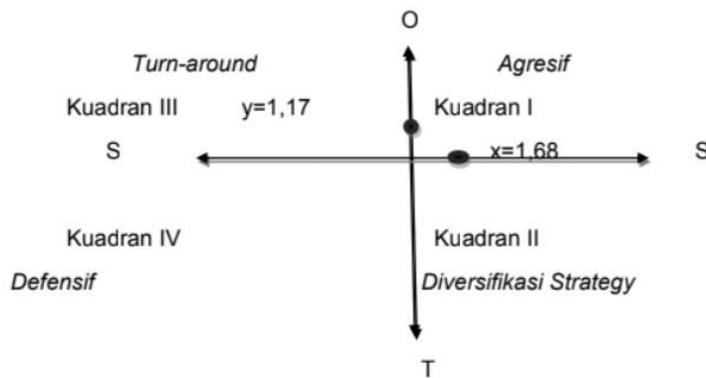
3.4 Kuadran SWOT

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan melalui skoring EFAS dan IFAS sehingga didapatkan nilai x dan y, maka dari hasil tersebut dapat menentukan arah strategis dalam menangani permasalahan pelaksanaan rekontruksi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui sebagai berikut:

$$X = 1,68$$

$$Y = 1,17$$

Berdasarkan hasil tersebut jika x bernilai positif dan juga y bernilai positif, maka posisinya berada di kuadran 1, sehingga posisi organisasi pada strategi bersifat agresif, berikut peneliti gambarkan posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil x dan y tersebut.



Sumber: diolah peneliti, 2022

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan An IX-X sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan rekonstruksi peneliti menemukan temuan penting yakni strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penanganan masalah rekonstruksi pasca bencana, yaitu membuat kebijakan dan program yang lebih baik dan spesifik serta melibatkan stakeholder dalam mendukung kebijakan dan program dari pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan peran aktif dari segala pihak baik pemerintah daerah, BPBD maupun stakeholder lainnya dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi tentang terjadinya bencana dan bantuan sosial bagi yang terdampak terjadinya bencana. Sama halnya dengan temuan Agung Mukti Wibowo Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan dalam Penanggulangan Bencana menghasilkan bahwa strategi yang dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kerja sama tim dengan pihak-pihak lain, memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya, meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana, meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, menambah jumlah Tim Reaksi Cepat. Sama halnya dengan temuan Dwi Anita Sari dan Ardhian Nehru bahwa peran pemerintah melalui Badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perka BNPB.

Layaknya program lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga masih memiliki beberapa hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran dan kurangnya koordinasi dengan stakeholder dan juga banyaknya tuntutan serta beberapa budaya masyarakat yang menolak pelaksanaan rekonstruksi, layaknya temuan Egi Solviandi dan Willy Hardi.

Adanya strategi yang telah dirumuskan diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dan dapat melaksanakan rekonstruksi yang efektif serta dapat mengembalikan aktivitas dan kegiatan masyarakat kecamatan Na IX-X seperti semula.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X, yang dimana dalam pelaksanaannya sendiri memiliki dana

anggaran yang kurang, kurangnya koordinasi antara stakeholder yang berkaitan dengan rekontruksi dan juga banyaknya tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan rekontruksi serta adanya budaya masyarakat yang bertentangan dalam pelaksanaan rekontruksi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kurangnya anggaran dalam melaksanakan rekontruksi serta koordinasi para stakeholder yang dinilai kurang cukup dalam mengkoordinasikan tentang pelaksanaan rekontruksi pasca bencana. Selanjutnya adalah masih banyaknya tuntutan masyarakat kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai kerusakan yang mereka alami dan kurangnya dukungan dari masyarakat kepada pemerintah dalam hal memberikan lahan dan pemukiman yang baru dan tentunya lebih aman dari bencana banjir bandang. Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penanganan masalah rekontruksi pasca bencana, yaitu membuat kebijakan dan program yang lebih baik dan spesifik serta melibatkan stakeholder dalam mendukung kebijakan dan program dari pelaksanaan rekontruksi pasca bencana, meningkatkan peran aktif dari segala pihak baik pemerintah daerah, BPBD maupun stakeholder lainnya dalam pelaksanaan rekontruksi pasca bencana dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi tentang terjadinya bencana dan bantuan sosial bagi yang terdampak terjadinya bencana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori strategi menurut Rangkuti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rekontruksi pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Na IX-X untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Na IX-X beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

B.N, Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Creswell, John W. 2014. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. London: SAGE Publications.

David, Fred R. 2011. *Strategic Management: Concept and Cases*. Jakarta: Salemba Empat.

Erly, Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Hamid, Hendrawati. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.

<https://www.labura.go.id/page/profil>

Husein, Umar. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hutabarat, Jemsley dan Martani Huseini. 2006. *Manajemen Strategis Kontemporer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Koswara, E. 2002. *Otonomi Daerah Untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Piramida.

Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Bandung: Rajawali.

Nehru, Ardhian. 2017. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Dalam Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Gunung Kelud di Desa Pandasari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Pearce John dan Robinson Richard. 2014. *Manajemen Strategis : Formulasi Implementasi, Dan Pengendalian* edisi 12 buku 1, Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pratama, Willy Hardi. 2018. Permasalahan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2009 di Sumatera Barat. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.

Pusat Pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan kontruksi, “Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir 2017”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi, 2017,77.

Qudrat Nugraha, *Manajemen Strategis Pemerintahan*, 2016, 1-51

Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rangkuti, Freddy.2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rohmat, Dwi Jatmiko. 2003. *Manajemen Strategik* Edisi Pertama. Malang:UMM PRESS.

Sari, Dwi Anita. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Kapubaten Sampang (Studi Kasus di Kabupaten Sampang). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Soviandi, Egi. 2018. Analisa Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Permasalahan Rekontruksi Rumah Pasca Bencana Tsunami Tahun 2010 di Kabupaten Mentawai. Skripsi. Universitas Andalas. Padang.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ermaya. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*. Bandung: CV Ramadhan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Wibowo, Agung Mukti. 2018. Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana. Tesis. STIE Widya Wiwaha. Yogyakarta.

Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian* Yogyakarta: Pustakabarupress

